

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Usu Press, Medan, 2015.
- Anshari Siregar, *Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- A.P. Parlindungan, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Arstiono Nugroho, Haryo Budhiawan, Tullus Subroto, dan Suharno, *Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar*, STPN Press, Yogyakarta, 2013.
- Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Boedie Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_ *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., USA, 1991.
- Edi Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Berdasarkan UU Nomor 56 (Prp) tahun 1966*, Armico, Bandung, 1983.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- I Nyoman Budi Jaya, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Mohamad Shohibuddin dan M. Nazir Salim, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta, 2012.
- Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, Liberty, Jogjakarta, 1997.
- Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2013.
- Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2018.
- Saleh Adiwinata, *Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Tim Penelitian Masalah Pertanahan, *Masalah Pertanahan di Indonesia: Laporan Interim Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas dan Menteri Negara Riset Republik Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta, 2020.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_ *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.

Y. W Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Zaidar, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian*.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang *Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.*

Keputusan Menteri Agraria No. SK.VI/6/Ka/1962 tentang *Perpanjangan Waktu Untuk Mengalihkan Tanah-Tanah Pertanian Absentee.*

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Nomor Sekra 9/1/2 tanggal 5 Januari 1961 tentang *Pelaksanaan Perpu No. 56/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.*

### C. Sumber Hukum Lain

Dinalara Dermawati Butarbutar, *Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai*, Pakuan Law Review, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2015.

Fitri Nur Sholikah, *Peralihan Hak Tanah Absente Berkaitan Dengan Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan Di Kabupaten Karanganyar*, <http://eprints.ums.ac.id/4228/1/C100040133.pdf>, diakses bulan Juni 2021.

Moh. Alfaris, *Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Sebagai Wujud Pelaksanaan Landreform.*

Mukmin Zakie, *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*, Legality, Vol.24, No.1

Maret 2016-Agustus 2016.

Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*, Kertha Widya,

Vol. 2 No. 1, Agustus 2014.

Saim Aksinudin, *Legal Assurance Of The Right Of The Certified Land Against*

*Adat Law In The Land Law System In Indonesia*, Journal Sampurasun, Vol.

04 No. 01, Juni 2018

Sultan Abdurrahman, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Absentee Dikaji*

*Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar*

*Pokok Agraria*, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016, Tahun 2016.

<http://e-journal.uajy.ac.id/8691/3/2MIH02000.pdf>, diakses Bulan Desember

2021.

<https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/05/tahapan-jual-beli-tanah/>, diakses

bulan Januari 2022.